



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERKEMBANGAN EKONOMI, KINERJA APBN, DAN KEBIJAKAN FISKAL

**Suahasil Nazara
Kepala Badan Kebijakan Fiskal**

.....
**CIMB Niaga Insurance and Pension Fund Client Gathering
Jakarta, 18 Februari 2019**

Pokok Bahasan

- 1 Perkembangan Perekonomian**
- 2 Perkembangan Sektor Keuangan**
- 3 Kinerja APBN 2018 (Realisasi Sementara)**
- 4 Kebijakan Fiskal dan APBN 2019**
- 5 Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Investasi dan Ekspor**



Makro Ekonomi

- Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik.
- Fundamental ekonomi yang kuat didukung oleh stabilnya pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh tingginya konsumsi masyarakat. Kinerja investasi juga menjadi kunci pendorong perekonomian Indonesia.
- Inflasi terus terjaga pada posisi rendah dan stabil, daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi terjaga dengan baik.
- Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi guna meningkatkan daya saing.
- Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing melalui reformasi struktural, termasuk penerapan *Online Single Submission Service* (OSS) untuk menyederhanakan prosedur investasi dan meningkatkan sektor pariwisata.



Sektor Keuangan

- Rupiah bergerak menguat di awal tahun 2019 disebabkan oleh "Shutdown" Pemerintah Federal Amerika Serikat awal 2019 meningkatkan ketidakpastian yang mengakibatkan Investor memilih berinvestasi di luar AS, termasuk ke negara-negara berkembang.
- Pasar Saham Menunjukkan Potensi Rebound Di 2019.
- Kontribusi Industri Asuransi masih rendah, namun memiliki pertumbuhan yang baik dan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dalam kondisi yang sehat.
- Trend peningkatan penetrasi diharapkan akan terus berlanjut bahkan mungkin lebih baik mengingat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif.
- Pertumbuhan dana pensiun sukarela stagnan sedangkan Program Pensiun Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Tumbuh cukup tinggi.



Fiskal

➤ Realisasi APBN 2018

- ❖ Pengelolaan fiskal Indonesia sangat berhati-hati dan mendukung stabilitas perekonomian.
- ❖ Defisit fiskal menyempit yang didorong oleh perbaikan di sisi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara.
- ❖ Keseimbangan primer mendekati nol dan memiliki tren yang terus menurun sejak 2015.

➤ APBN 2019

- ❖ Postur APBN disusun agar tetap sehat, berkeadilan, dan berkesinambungan.
- ❖ Pemerintah terus optimis atas penerimaan negara dengan menjaga iklim usaha dan investasi yang baik.
- ❖ Belanja negara diarahkan lebih produktif (berpengaruh langsung terhadap pengembangan SDM, infrastruktur, perlindungan sosial, dan mitigasi risiko bencana).
- ❖ Pemerintah mengurangi pembiayaan melalui utang dan lebih bergantung pada penerimaan negara
- ❖ Pemerintah mengimplemntasikan pengelolaan utang yang profesional dan bertanggung jawab untuk menciptakan pengelolaan fisjkal yang berhati-hati dan berkesinambungan.



1

Perkembangan Perekonomian



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

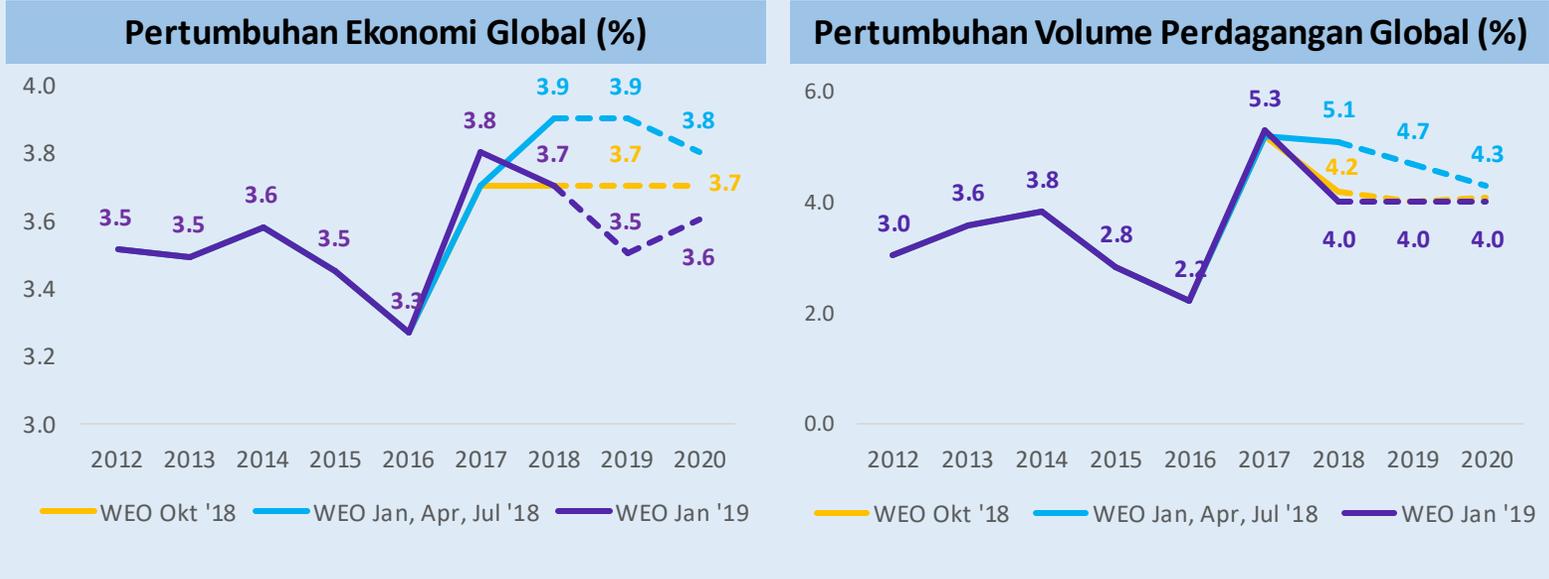


Ketidakpastian Perekonomian Global Semakin Tinggi

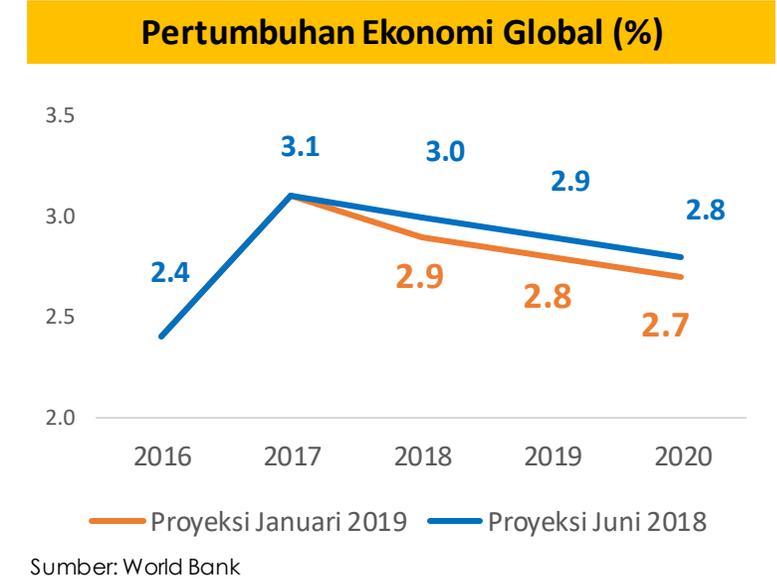


Terlihat dari turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 dan 2020

Proyeksi IMF dalam World Economic Outlook Januari 2019



Proyeksi WB dalam Global Economic Prospect Januari 2019

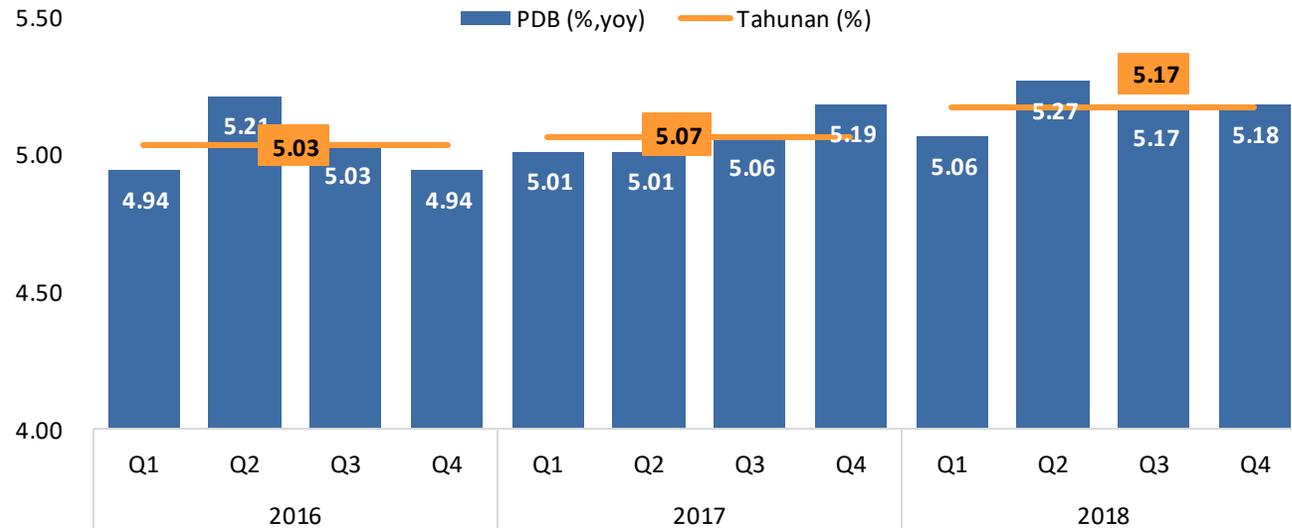


	2017	Proyeksi IMF		
		2018	2019	2020
Negara Maju	2,4	2,3	2,0	1,7
- AS	2,2	2,9	2,5	1,8
- Eropa	2,4	1,8	1,6	1,7
- Jepang	1,9	0,9	1,1	0,5
- Inggris	1,8	1,4	1,5	1,6
Negara Berkembang	4,7	4,6	4,5	4,9
- Tiongkok	6,9	6,6	6,2	6,2
- India	6,7	7,3	7,5	7,7
- ASEAN-5	5,3	5,2	5,1	5,2

- Perekonomian negara maju dan berkembang diprediksi melambat, kecuali India.
- Prospek pertumbuhan lebih rendah akibat meningkatnya risiko perekonomian global: normalisasi moneter AS dan perang dagang antara AS-Tiongkok.
- Perlambatan berimbas pada prospek permintaan global, tergambar dari proyeksi pertumbuhan perdagangan global yang melambat.

Perekonomian Indonesia melanjutkan momentum pertumbuhan

Didukung oleh solidnya konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi

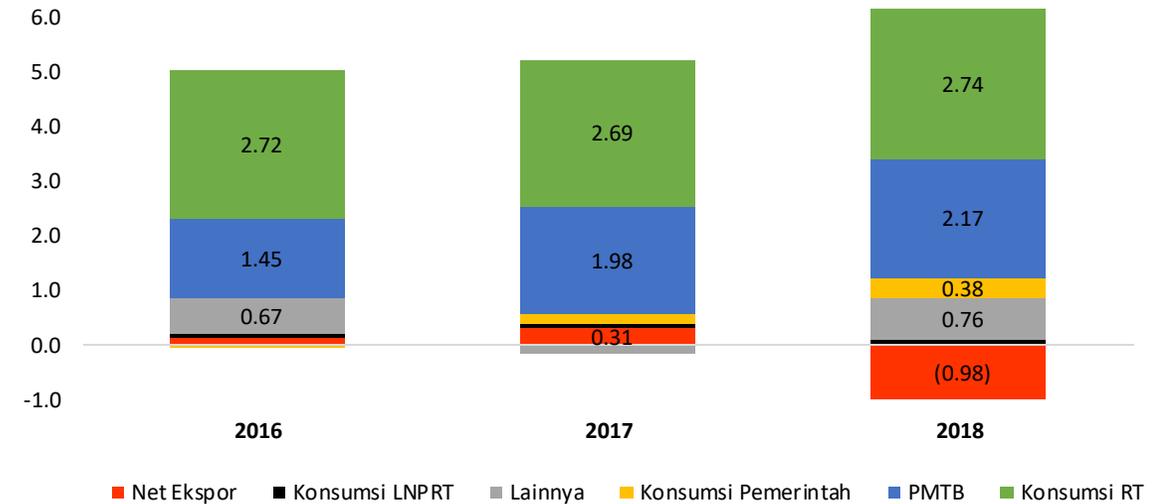


Sumber: BPS, diolah

Kontribusi Pertumbuhan PDB Sektoral (yoy)

SEKTOR	2016	2017	2018	Distribusi 2018
Primer <i>Pertanian dan Pertambangan</i>	0,52	0,55	0,67	20,89
Sekunder <i>Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi</i>	1,49	1,60	1,57	31,65
Tersier <i>Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya</i>	2,42	2,44	2,52	43,41

Kontribusi Pertumbuhan PDB Pengeluaran



- Sisi **produksi**: kontribusi sektor utama, Pertanian, Pertambangan, dan Perdagangan meningkat.
- Sektor lain termasuk industri pengolahan (kontributor terbesar) melambat
- Pertumbuhan PDB 2018 5,17%, tertinggi sejak 2013.
- Sisi **Pengeluaran**:
 - **Konsumsi RT, Pemerintah, dan Investasi** meningkat.
 - Kontribusi **Konsumsi RT** dominan, dengan tren meningkat.
 - **Perdagangan Internasional** negatif sejalan perlambatan ekspor.
 - **Perubahan Inventori** tinggi seiring peningkatan impor dan industri.

Pertumbuhan PDB Q4 2018 menurut komponen pengeluaran

Tingginya pertumbuhan ekonomi didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi, sedangkan perdagangan internasional masih tertahan



Komponen Pengeluaran (yoy)	2016					2017					2018				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Konsumsi RT dan LNPRT	4,99	5,13	5,05	5,01	5,04	5,00	5,03	4,93	4,98	4,98	5,01	5,23	5,07	5,20	5,13
Konsumsi RT	4,96	5,09	5,02	4,98	5,01	4,94	4,95	4,91	4,98	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Konsumsi LNPRT	6,41	6,73	6,67	6,75	6,64	8,08	8,53	6,04	5,26	6,93	8,10	8,75	8,59	10,79	9,08
Konsumsi Pemerintah	3,43	6,21	(2,96)	(4,02)	(0,14)	2,69	(1,94)	3,46	3,80	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
PMTB	4,67	4,18	4,24	4,79	4,47	4,77	5,34	7,08	7,26	6,15	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67
Ekspor	(3,08)	(1,51)	(5,89)	3,90	(1,66)	8,36	2,73	16,48	8,42	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor	(4,98)	(3,43)	(4,09)	2,74	(2,41)	4,78	0,18	15,40	11,91	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
PDB	4,94	5,21	5,03	4,94	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17

Sumber: BPS, diolah

- **Konsumsi RT** tumbuh 5,08% didukung pertumbuhan perdagangan eceran dan inflasi yang stabil.
- **Konsumsi LNPRT** tumbuh 10,79% seiring tingginya aktivitas sosial dan partai politik menjelang pemilu.
- **Konsumsi Pemerintah** tumbuh 4,56% didorong membaiknya realisasi APBN Q4, transfer ke daerah dan belanja pemerintah pusat.
- **PMTB** tumbuh 6,01%, melambat seiring turunnya pertumbuhan komponen mesin dan perlengkapan, bangunan dan peralatan lainnya, dan impor barang modal.
- Sisi **perdagangan internasional**, pertumbuhan ekspor di bawah pertumbuhan impor.:
 - Ekspor tumbuh 4,33% lebih rendah dari Q4 2017 akibat perlambatan perdagangan global dan pertumbuhan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang.
 - Pertumbuhan impor 7,10% lebih rendah dari Q4 2017.

Pertumbuhan PDB menurut sisi produksi

Seluruh sektor ekonomi mampu mencatatkan kinerja positif



Pertumbuhan PDB per Sektor (%, YoY)	2016					2017					2018				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Sektor Primer	1.37	2.59	2.09	3.70	2.41	3.69	2.87	2.47	1.39	2.62	2.45	3.96	3.30	3.19	3.24
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.48	3.53	3.22	5.50	3.37	7.11	3.32	2.83	2.39	3.87	3.34	4.72	3.66	3.87	3.91
Pertambangan dan Penggalian	1.22	1.04	0.17	1.35	0.95	-1.30	2.11	1.83	0.04	0.66	1.06	2.65	2.67	2.25	2.16
Sektor Sekunder	5.39	4.82	4.63	3.56	4.58	4.69	4.32	5.52	5.30	4.96	5.39	4.56	4.84	4.72	4.87
Industri Pengolahan	4.68	4.62	4.47	3.28	4.26	4.28	3.50	4.88	4.51	4.29	4.60	3.88	4.35	4.25	4.27
Pengadaan Listrik, Gas, dan Air	7.35	6.09	4.69	3.11	5.26	1.80	-2.09	4.88	2.50	1.76	3.33	7.29	5.62	5.64	5.47
Konstruksi	6.76	5.12	4.95	4.21	5.22	5.96	6.95	6.98	7.24	6.80	7.35	5.73	5.79	5.58	6.09
Sektor Tersier	6.02	6.34	5.49	4.86	5.66	5.60	5.20	5.89	5.92	5.66	5.80	5.70	6.03	5.80	5.83
Perdagangan Besar dan Eceran	4.31	4.29	3.66	3.86	4.03	4.61	3.47	5.22	4.53	4.46	4.99	5.22	5.28	4.39	4.97
Transportasi & Pergudangan	7.42	6.52	8.18	7.64	7.45	8.06	8.80	8.88	8.21	8.49	8.56	8.70	5.65	5.34	7.01
Informasi dan Komunikasi	7.58	9.31	8.93	9.62	8.88	10.48	11.06	8.82	8.27	9.63	7.76	5.11	8.14	7.17	7.04
Jasa Keuangan dan Asuransi	9.33	13.62	9.08	4.21	8.93	6.01	5.93	6.13	3.82	5.47	4.23	3.06	3.14	6.27	4.17
Sektor Jasa-Jasa Lainnya	5.87	5.53	4.53	3.84	4.92	4.32	3.89	4.78	6.26	4.83	5.56	6.17	6.79	6.45	6.25
PDB	4.94	5.21	5.03	4.94	5.03	5.01	5.01	5.06	5.19	5.07	5.06	5.27	5.17	5.18	5.17

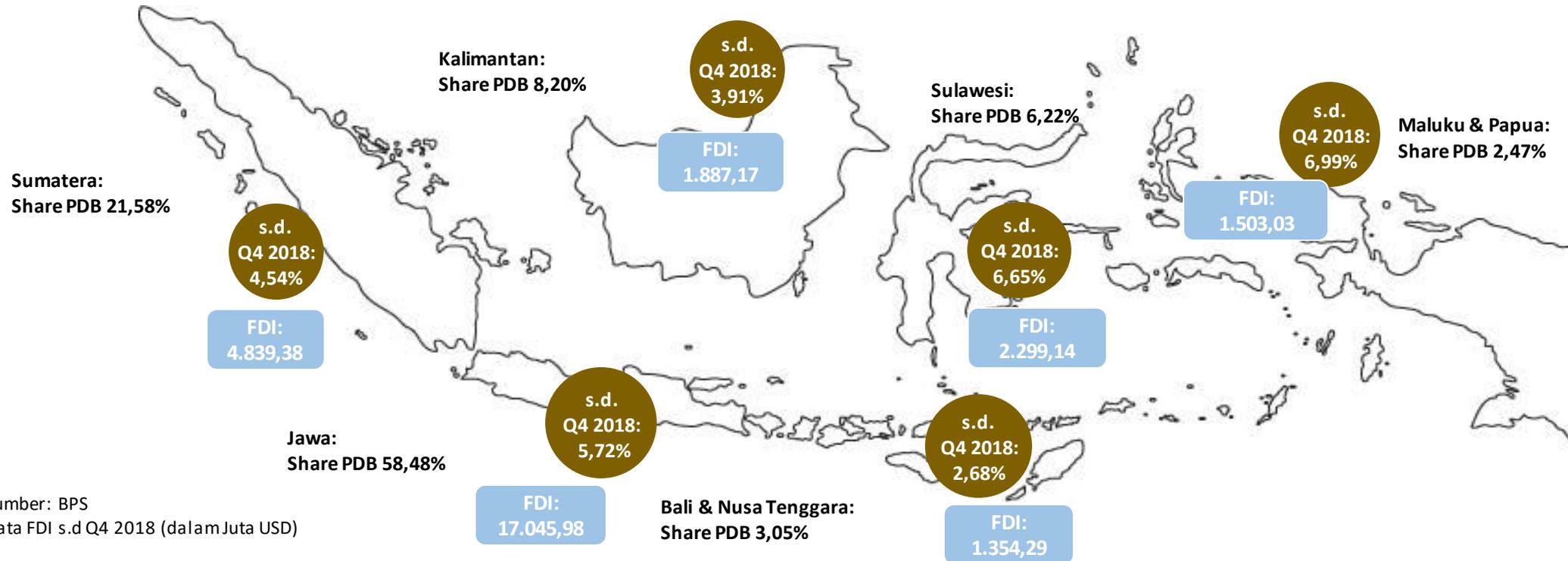
Sumber: BPS, Diolah

- **Pertanian: stabil** ditopang kinerja kelompok tanaman pangan dan perikanan. Sektor perkebunan melambat akibat turunnya produksi CPO.
- **Pertambangan: meningkat** ditopang performa produksi dan ekspor batubara. Produksi di tambang migas dan logam mengalami kontraksi.
- **Industri Pengolahan: melambat** seiring pelemahan industri makanan minuman akibat produksi CPO menurun. Non migas, tekstil dan pakaian jadi, logam dasar, mesin dan perlengkapan tumbuh tinggi.

- **Perdagangan: stabil** seiring kinerja konsumsi rumah tangga dan penjualan kendaraan. Ekspor dan impor melambat (dibanding Q4 2017).
- **Transportasi & Pergudangan: melambat** sesuai penurunan kinerja angkutan rel, laut, dan udara.
- **Jasa Keuangan: tumbuh tinggi** ditopang perbaikan perbankan dan pasar modal dengan peningkatan indikator pertumbuhan kredit perbankan dan likuiditas pasar modal.

Pertumbuhan ekonomi spasial

Maluku & Papua tumbuh paling tinggi, namun Bali & Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan yang lambat



Sumber: BPS
Data FDI s.d Q4 2018 (dalam Juta USD)

- Pertumbuhan spasial didominasi Pulau Jawa, diikuti Sumatera dan Kalimantan.
- Maluku & Papua, Sulawesi, dan Jawa tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
- Pertumbuhan Indonesia Timur lebih tinggi dari pertumbuhan nasional menggambarkan perbaikan pemerataan pembangunan.
- Bali & Nusa Tenggara tumbuh positif (sebelumnya negatif) meski terendah dikarenakan proses pemulihan pasca bencana.
- Investasi didominasi Jawa dengan FDI USD 17 miliar. Bali dan Nusa Tenggara lebih rendah dari daerah lain.

Realisasi penanaman modal tahun 2018 tumbuh 4,1%

Ditengah dinamika perekonomian global, realisasi penanaman modal Indonesia masih tumbuh positif

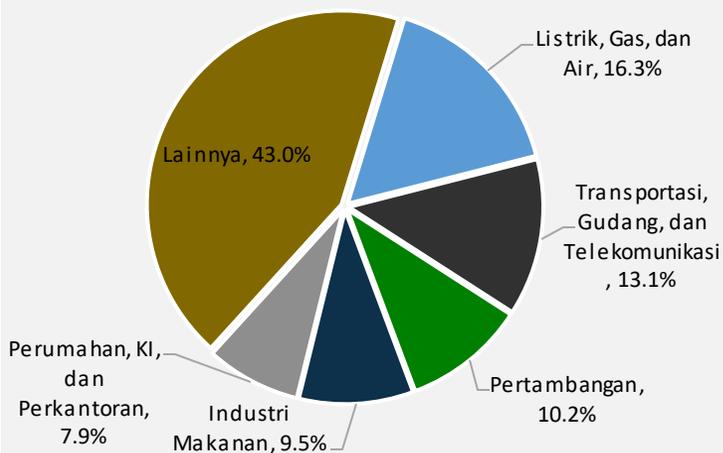


Realisasi Penanaman Modal Tahun 2018*

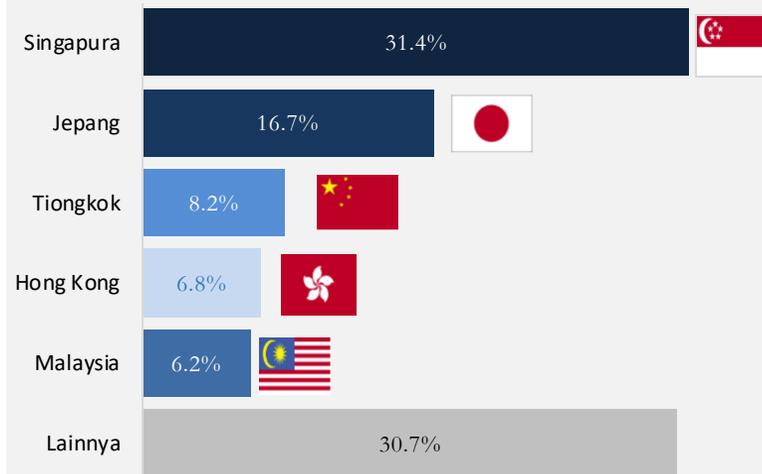
Realisasi	Q1		Q2		Q3		Q4		2018	
	Rp T	%, yoy	Rp T	%, yoy	Rp T	%, yoy	Rp T	%, yoy	Rp T	%, yoy
PMDN	76,4	11,0	80,6	32,1	84,7	30,5	86,9	28,6	328,6	25,3
PMA	108,9	12,3	95,7	-12,9	89,1	-20,2	99,0	-11,6	392,7	-8,8
Total	185,3	11,8	176,3	3,2	173,8	-1,6	185,9	3,5	721,3	4,1

*Realisasi berdasarkan LKPM. Tidak termasuk investasi di Sektor Migas, Perbankan Lembaga Keuangan Non Bank, serta Industri Rumah Tangga

Sektor yang Diminati Investor Tahun 2018



Negara Asal PMA Tahun 2018



Sumber: NSWi BKPM, diolah

- Penanaman modal dalam negeri meningkat.
 - Didukung investasi Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, dan Konstruksi
- PMA menurun setelah kebijakan moneter Amerika dan penurunan arus modal global
 - **Sektor turun:** Pertambangan dan Industri Logam.
 - **Sektor tumbuh:** Perumahan, KI, dan Perkantoran serta Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.
- Industri logam (*smelter*), ekonomi digital (*e-commerce*) dan pariwisata akan menjadi *driver* penanaman modal.

Indikator Kesejahteraan

Dengan perkembangan ekonomi yang terjaga sehat, kesejahteraan masyarakat secara umum terus membaik



Rasio Gini



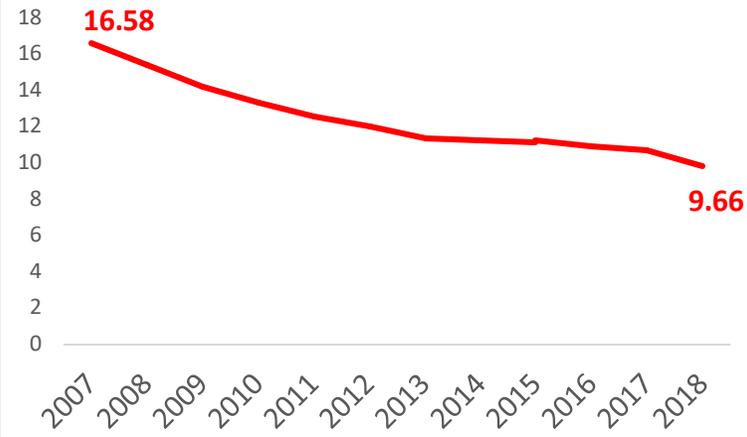
Target Gini ratio 2019

0,38 – 0,39

Tantangan

- Disparitas akses permodalan
- Kondisi geografis

Tingkat Kemiskinan (%)



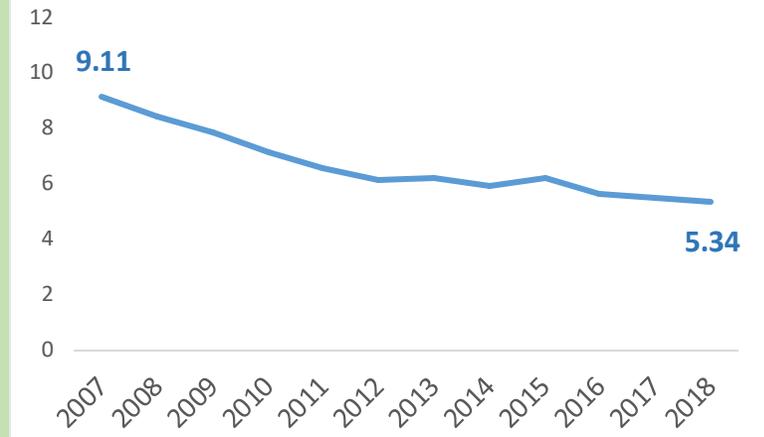
Target Kemiskinan 2019

8,5% - 9,5%

Tantangan

- Akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin
- Perubahan iklim → harga pangan

Tingkat Pengangguran (%)



Target pengangguran 2019

4,8% - 5,2%

IPM : 71,98

Tantangan

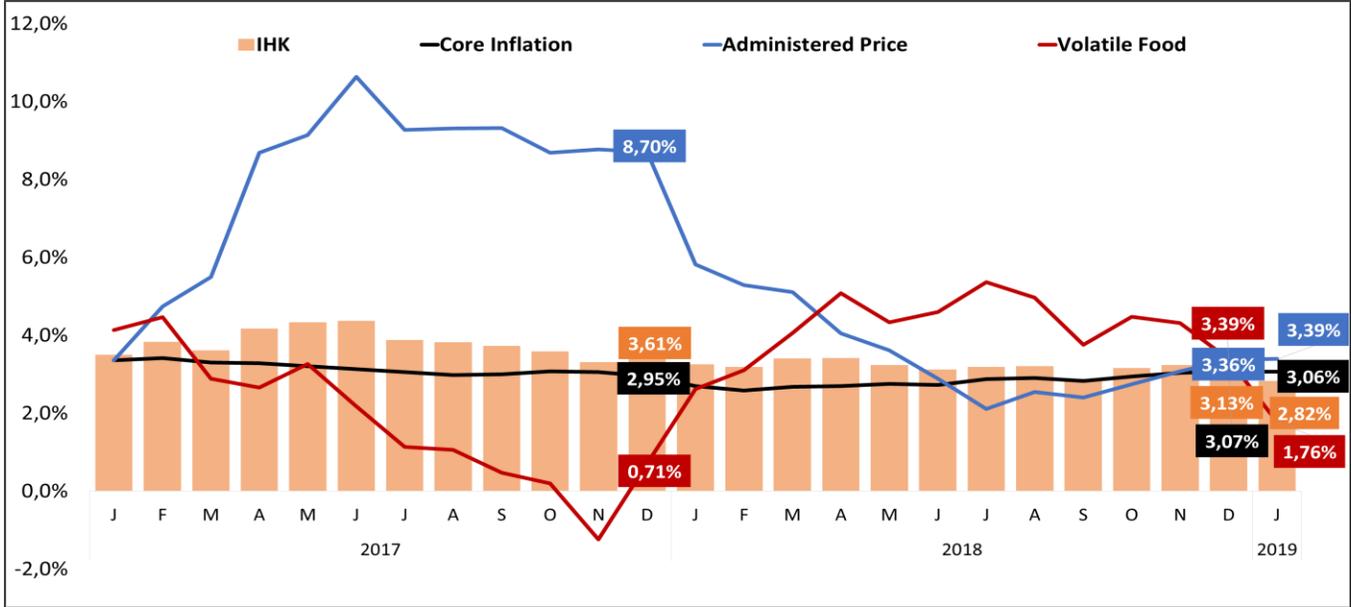
- Perubahan ekonomi → struktur lapangan kerja
- *Skill mismatch*
- 4th *Industrial Revolution* (automasi, *artificial intelligence*)



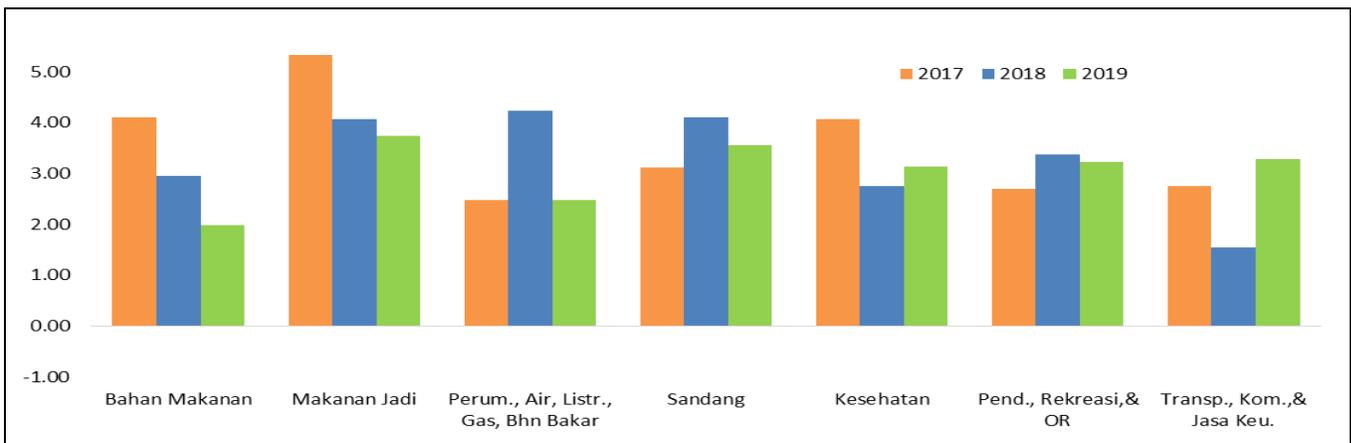
Inflasi januari 2019 terkendali pada tingkat 0,32% (mtm) atau 2,82% (yoy)

Perkembangan positif laju inflasi di awal tahun didukung oleh terjaganya inflasi komponen *volatile food*.

Perkembangan Inflasi dan Komponennya



Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran – Januari (%yoy)



Sumber: BPS, diolah

- *Volatile food* turun 1,76% (yoy) seiring terkendalinya inflasi beras dan deflasi pada komoditas hortikultura.
- Komponen inti stabil $\pm 3\%$, dipengaruhi meningkatnya harga emas, tarif sewa dan kontrak rumah, upah tukang bukan mandor dan pembantu rumah tangga.
- *Administered price* stabil, dipengaruhi penurunan harga bensin nonsubsidi seiring turunnya harga minyak mentah dan tarif kereta api serta berakhirnya liburan akhir tahun.



Defisit transaksi berjalan tahun 2018 masih dalam batas aman, sebesar USD31,1 miliar atau 2,98% dari PDB

Komponen (Milliar USD)	2016	2017	2018				
			Q1*	Q2*	Q3*	Q4**	Total**
I. Transaksi Berjalan	-17.0	-16.2	-5.3	-7.9	-8.6	-9.1	-31.1
A. Barang ¹⁾	15.3	18.8	2.3	0.3	-0.5	-2.6	-0.4
- Ekspor	144.5	168.9	44.4	43.7	47.7	44.9	180.7
- Impor	-129.2	-150.1	-42.1	-43.5	-48.2	-47.5	-181.2
a. Nonmigas	19.5	25.3	4.4	3.2	3.4	0.1	11.2
b. Migas	-4.8	-7.3	-2.4	-2.8	-3.6	-2.8	-11.6
B. Jasa - jasa	-7.1	-7.4	-1.6	-1.8	-2.0	-1.6	-7.1
C. Pendapatan Primer	-29.6	-32.1	-7.5	-8.0	-7.9	-7.0	-30.4
D. Pendapatan Sekunder	4.5	4.5	1.4	1.6	1.8	2.0	6.9
II. Transaksi Modal	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
III. Transaksi Finansial ²⁾	29.3	28.7	2.2	3.3	3.9	15.7	25.1
1. Investasi Langsung	16.1	18.5	4.8	2.5	4.6	2.0	13.8
2. Investasi Portofolio	19.0	21.1	-1.1	0.1	-0.1	10.4	9.3
3. Derivatif Finansial	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	-0.2	-0.1
4. Investasi Lainnya	-5.8	-10.7	-1.5	0.7	-0.7	3.5	2.0
IV. Total (I + II + III)	12.4	12.5	-3.1	-4.6	-4.7	6.5	-5.9
V. Selisih Perhitungan Bersih	-0.3	-1.0	-0.8	0.3	0.3	-1.1	-1.3
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	12.1	11.6	-3.9	-4.3	-4.4	5.4	-7.1
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait ³⁾	-12.1	-11.6	3.9	4.3	4.4	-5.4	7.1
A. Transaksi Cadangan Devisa	-12.1	-11.6	3.9	4.3	4.4	-5.4	7.1
B. Kredit dan Pinjaman IMF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. Exceptional Financing	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Memorandum:							
- Posisi Cadangan Devisa	116.4	130.2	126.0	119.8	114.8	120.7	120.7
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	8.4	8.3	7.7	6.9	6.3	6.5	6.5
- Transaksi Berjalan (% PDB)	-1.82	-1.60	-2.07	-3.01	-3.28	-3.57	-2.98

Catatan:
¹⁾ Dalam free on board (fob).
²⁾ Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait.
³⁾ Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit.

Sumber: Bank Indonesia

* Angka - angka sementara
 ** Angka - angka sangat sementara

- Defisit Transaksi Berjalan tahun 2018 tercatat USD 31,1 miliar
 - Defisit transaksi berjalan pada Q4 2018 tercatat USD9,1 miliar, meningkat dari kuartal sebelumnya dipengaruhi penurunan perdagangan nonmigas dimana impor tinggi sejalan dengan kuatnya permintaan domestik di tengah terbatasnya ekspor.
 - Sampai akhir 2018, ekspor barang tercatat USD 180,7 miliar, sementara impor sebesar USD 181,2.
- BOP 2018 tercatat defisit USD7,1 miliar.
 - Sampai akhir 2018, transaksi modal dan finansial surplus signifikan sebesar USD25,2 miliar didukung peningkatan investasi portofolio, penerbitan obligasi global dan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia.
- Cadangan devisa pada Desember 2018 sebesar USD120,7 miliar, tergerus sekitar USD11,2 miliar dibandingkan dengan posisi Januari 2018 yang sebesar USD131,9 miliar.



2 Perkembangan Sektor Keuangan

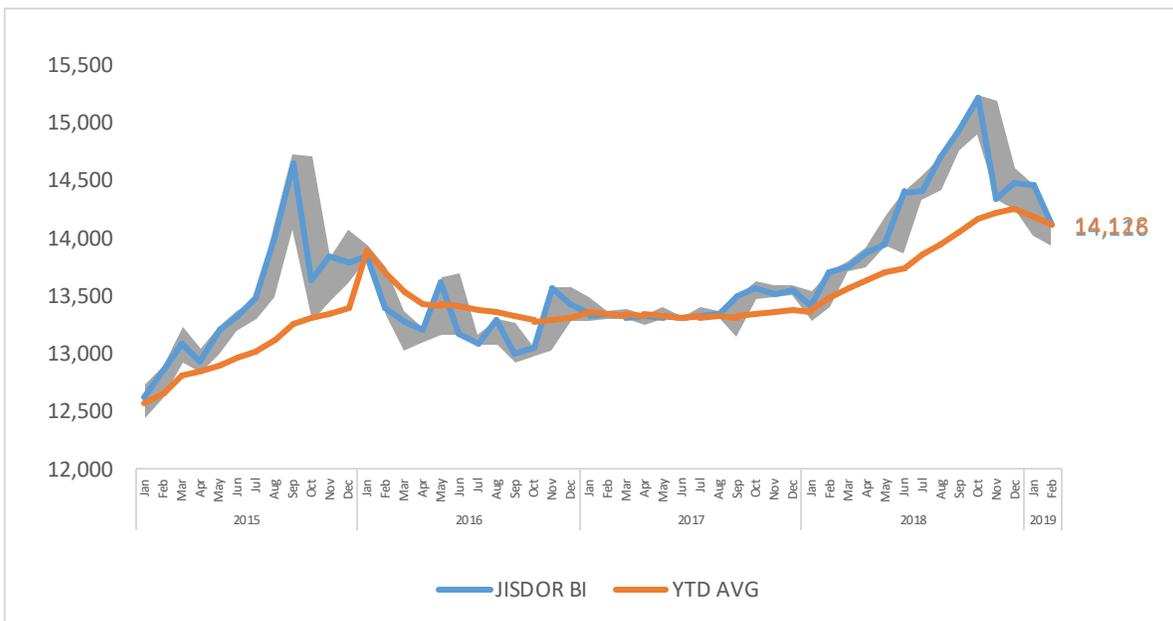


Rupiah Bergerak Menguat pada Awal Tahun 2019

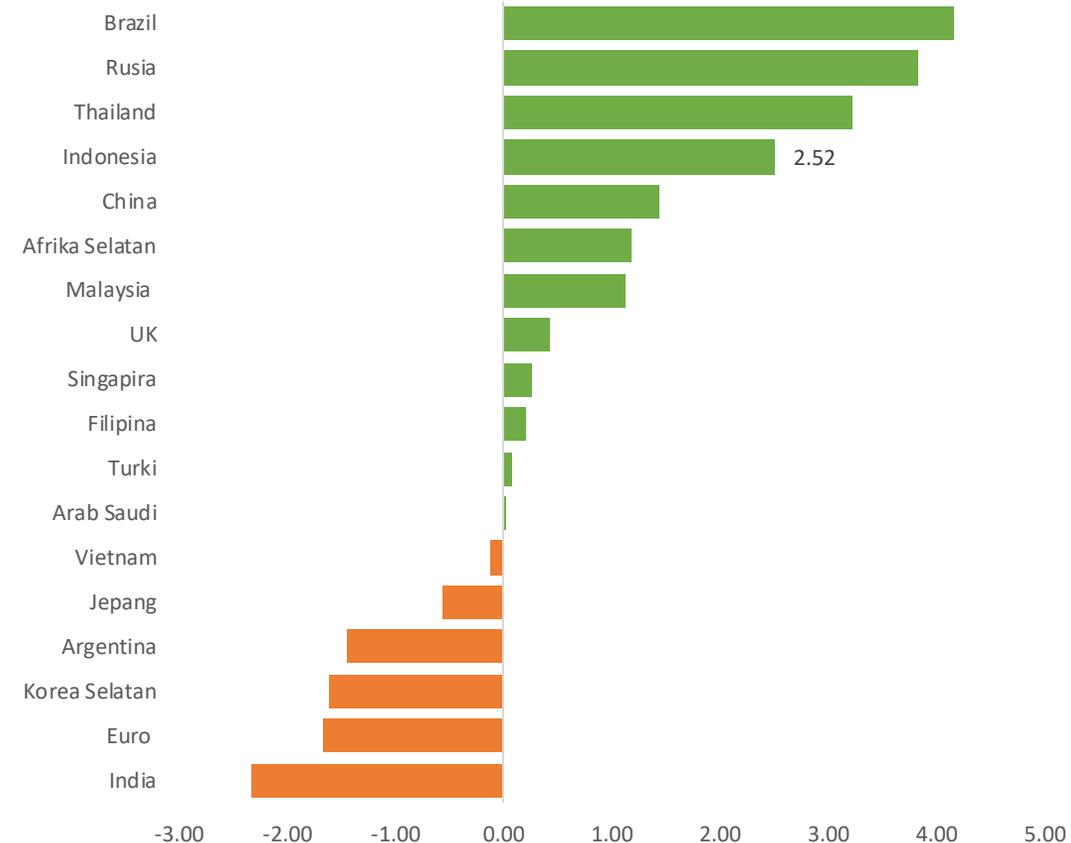
Rupiah telah menguat 2,52 persen dan menjadi salah satu mata uang dengan penguatan terbesar di 2019



Rupiah telah menguat 2,52 persen dan menjadi salah satu mata uang dengan penguatan terbesar di 2019



- Rupiah menguat sejak Oktober 2018 dan terus berlanjut.
- 31 Januari 2019 Rupiah ditutup Rp. 14.072/USD, menguat dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.481 /USD.
- Selama setengah bulan di Februari 2019, Rupiah masih menunjukkan profil penguatan, antara lain didukung oleh tingginya modal asing yang masuk ke pasar domestik Indonesia.
- Terdapat Rp. 30 T (14 T Saham & 16 T di SUN) dana asing yang masuk ke pasar domestic Indonesia selama Januari 2019.

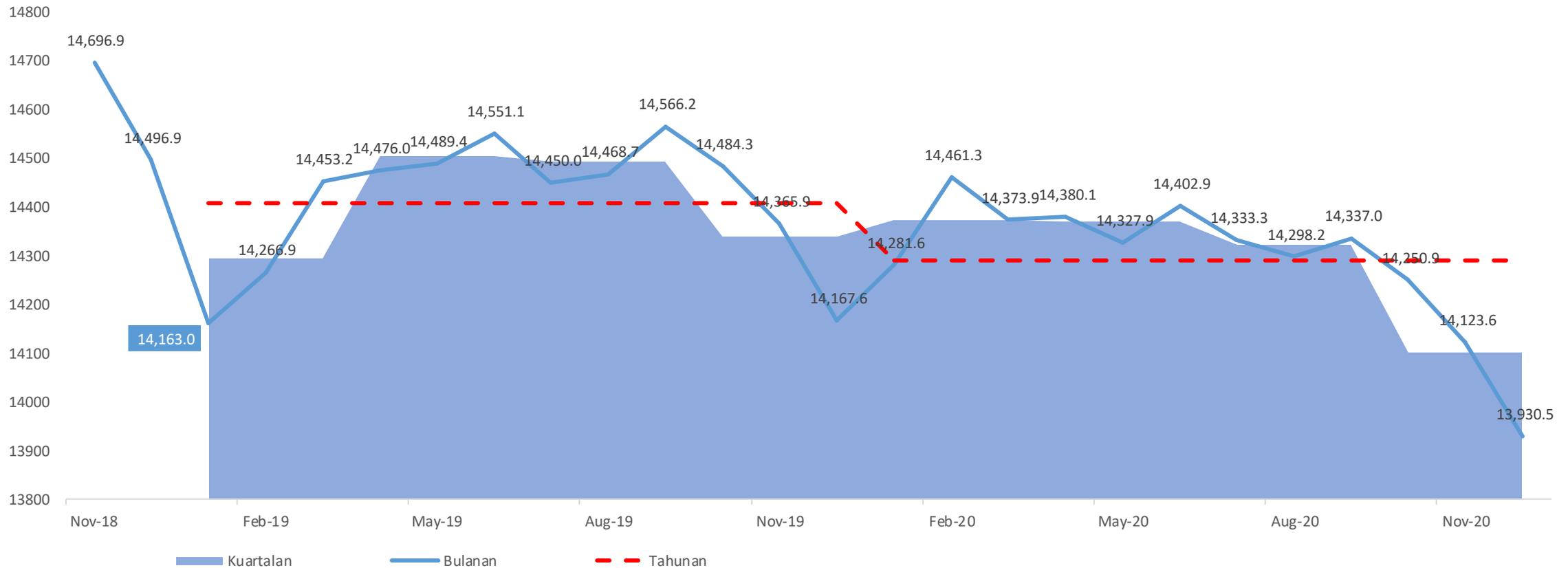


- Jika dibandingkan sejak 31 Oktober 2018, sampai 15 Februari 2019 Rupiah telah menguat 7,3 persen.

Outlook Rupiah Tahun 2019 (Proyeksi Akhir Januari 2019)



Rupiah masih akan mengalami tekanan di 2019 dan diproyeksikan bergerak dengan rata-rata Rp.14.400/USD



- Secara fundamental, outlook Rupiah tahun 2019 diproyeksikan akan dibawah dari asumsi APBN 2019 sebesar Rp.15.000/USD
- Proyeksi dihitung pada akhir Januari 2018 dan berdasarkan outlook pergerakan indikator (Suku Bunga Acuan, Inflasi, Aktivitas Ekonomi dan Likuiditas) di Indonesia dan Amerika Serikat dan belum mempertimbangkan adanya faktor non-fundamental lain yang dapat mempengaruhi Rupiah (Perkembangan Brexit, Perang Dagang, dll)
- Rupiah diperkirakan akan menguat di tahun 2020, khususnya karena makin membaiknya fundamental ekonomi Indonesia.

Outlook Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2019

Proyeksi Suku Bunga SPN 3 Bulan 2019 berada pada rentang 5,6% - 5,8%



Tanggal	Yield	Yield (YTD)	Dimenangkan (juta rupiah)	Bid-to-cover
2018				
12/09/2018	5,58	4,69	3.000.000	4,07
25/09/2018	5,57	4,75	3.000.000	5,00
09/10/2018	5,79	4,81	3.000.000	2,48
23/10/2018	5,81	4,86	2.600.000	1,38
06/11/2018	5,76	4,91	1.000.000	3,80
21/11/2018	5,80	4,95	1.000.000	3,90
2019				
3/01/2019	5,80	5,80	2.000.000	3,54
15/01/2019	5,80	5,80	2.000.000	3,12
28/01/2019	5,80	5,80	2.000.000	3,85
12/02/2019	5,80	5,80	2.000.000	2,68

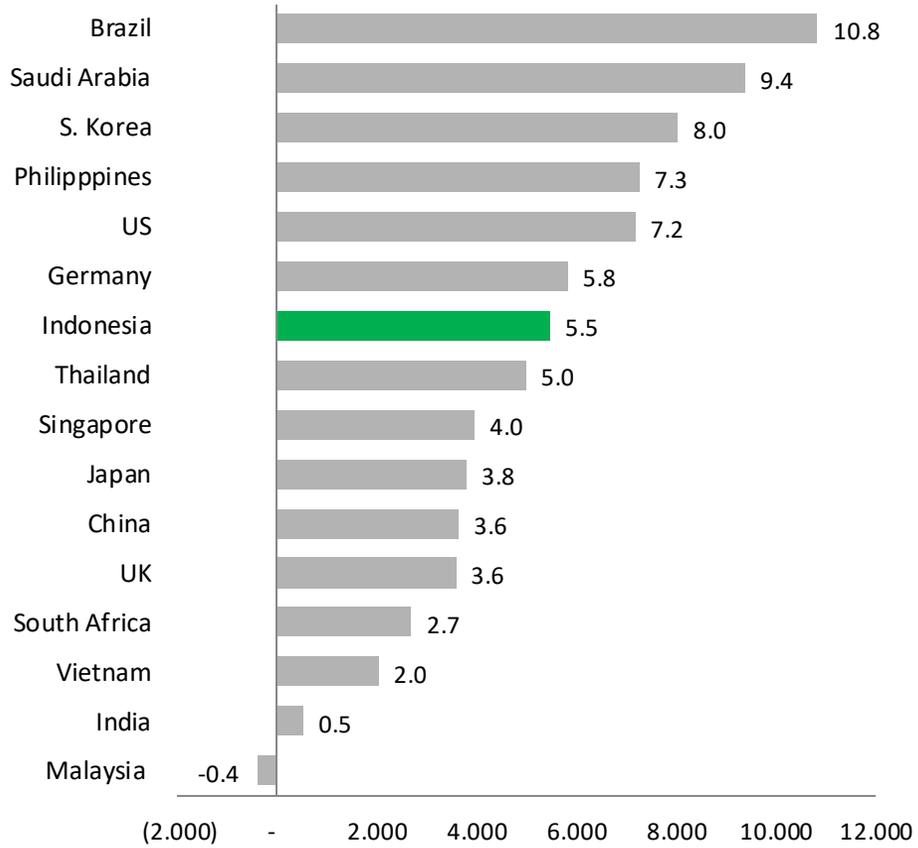
- 4 Lelang SPN 3 Bulan pada tahun 2019 memberikan Yield tertimbang 5,8%
- Titik awal yang tinggi mendorong lelang tahun 2019 memberikan imbal hasil yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,8%. Sebagai perbandingan, empat lelang pertama pada 2018 menghasilkan rata-rata yield 4,06%.
- Bid-to Cover ratio juga belum mencapai tingkat pada lelang terakhir di tahun 2018.
- Tingginya realisasi yield SPN ini berpotensi berlanjut dan dapat naik dengan adanya proyeksi naiknya suku bunga acuan global pada tahun 2019
- Mempertimbangkan potensi kenaikan FFR tahun 2019 dan adanya sumber ketidakpastian baru di pasar keuangan global, Suku Bunga SPN 3 Bulan 2019 diproyeksikan akan berada pada rentang 5,6% - 5,8%.

Pasar Saham Menunjukkan Potensi Rebound di 2019

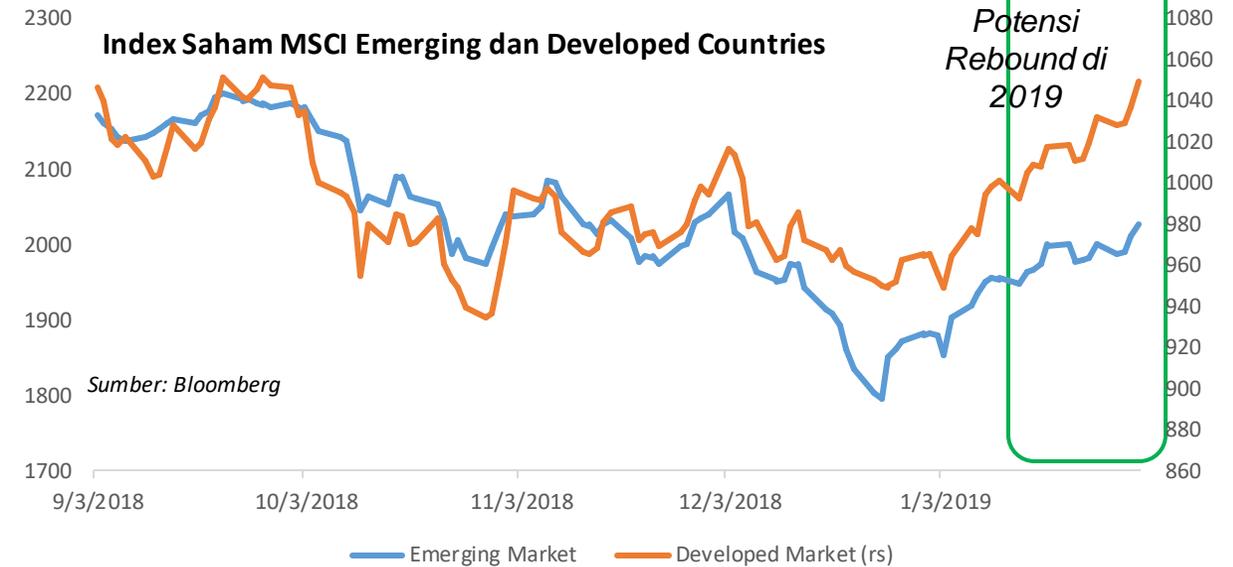
Setelah performa negatif di 2018, indeks saham global mengalami kenaikan di awal tahun 2019



Perubahan Harga Saham Per Januari 2019 (% ytd)



Sumber: Bloomberg



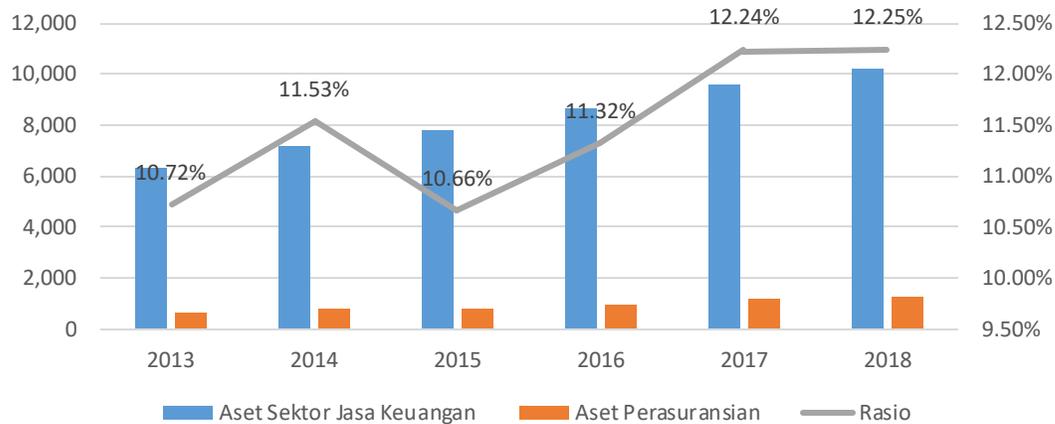
- Index saham di negara berkembang maupun negara maju menunjukkan kontraksi yang cukup dalam selama kuartal terakhir di tahun 2018. Namun, mulai terlihat adanya potensi *rebound* pada awal 2019.
- Index saham Indonesia naik 5,5% selama Januari 2019, hal ini lebih baik dibandingkan kontraksi yang terjadi selama tahun 2018.
- Dalam kondisi tekanan *capital outflow*, peran dari investor domestik pada pasar saham Indonesia juga telah membantu menjaga tingkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk masih relatif tinggi dibandingkan 2016 maupun 2017. %.

Industri Asuransi Di Indonesia

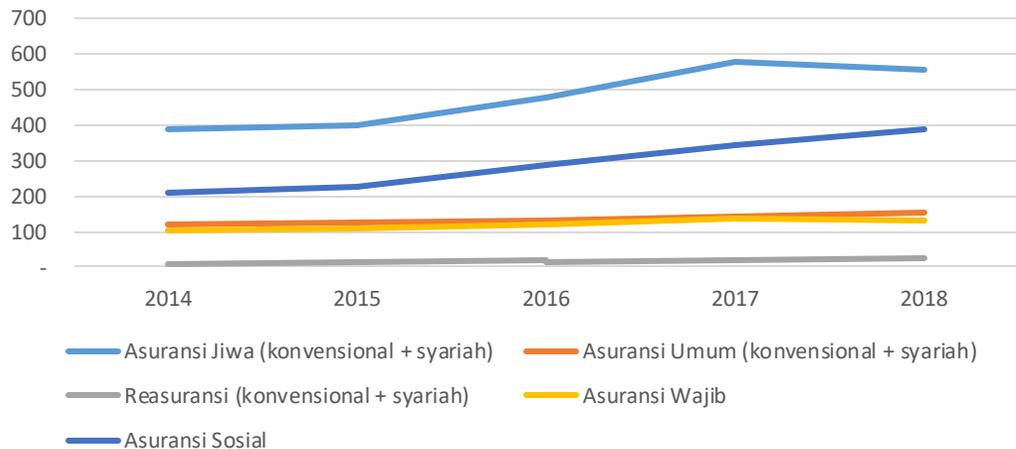


Meskipun Industri Asuransi kontribusinya masih rendah, namun memiliki pertumbuhan yang baik

Perbandingan Aset Asuransi dengan Aset Sektor Jasa Keuangan



ASET ASURANSI JIWA, UMUM, REASURANSI, WAJIB & SOSIAL



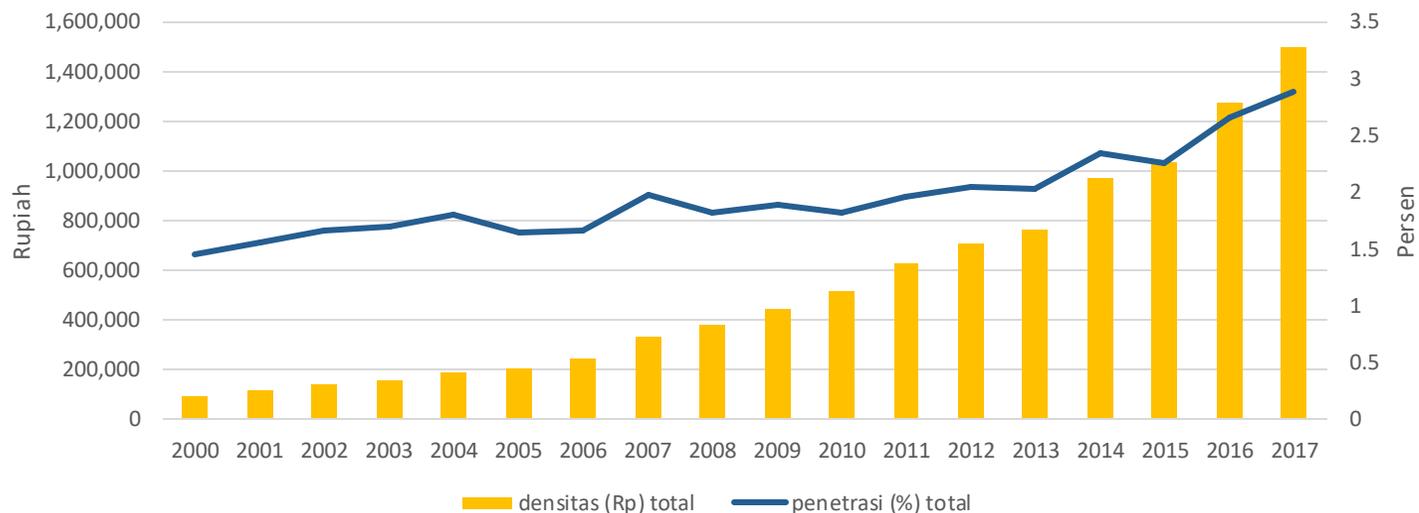
- Aset industri asuransi merupakan aset terbesar kedua setelah Perbankan. Aset industri asuransi masih lebih besar dibandingkan dengan industri jasa keuangan lain seperti dana pensiun, pembiayaan, atau penjaminan.
- Aset Industri Asuransi tumbuh lebih dari dua kali lipat dalam 6 tahun terakhir
- Asuransi Jiwa mendominasi jumlah asset industri perasuransian. Dengan komposisi aset (Tahun 2017): Asuransi Jiwa (45%), Asuransi Wajib (12%), Asuransi Umum dan Reasuransi (13%), dan Asuransi Sosial (30%). Aset Industri Asuransi Jiwa terutama berasal dari kontribusi bisnis asuransi unit link.

Densitas, Penetrasi, dan Solvabilitas Asuransi Di Indonesia



Tingkat densitas (premi per jumlah penduduk) dan penetrasi asuransi terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir

Densitas dan Penetrasi Asuransi



Trend peningkatan penetrasi diharapkan akan terus berlanjut bahkan mungkin lebih baik mengingat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif

RASIO TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	Sep-18
Asuransi Jiwa	575.3%	566.0%	529.0%	432.4%	521.0%	430.5%
Asuransi Umum dan Reasuransi	331.7%	280.0%	270.0%	266.7%	321.0%	315.3%

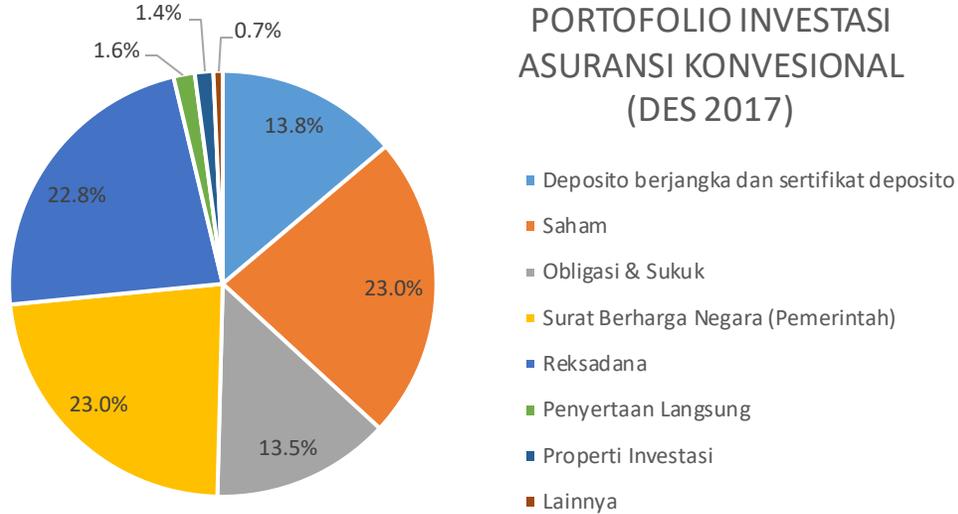
(Asuransi Konvensional)

- Secara umum tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dalam kondisi yang sehat
- RBC yang dipersyaratkan oleh OJK adalah 120% dari modal minimum berbasis risiko

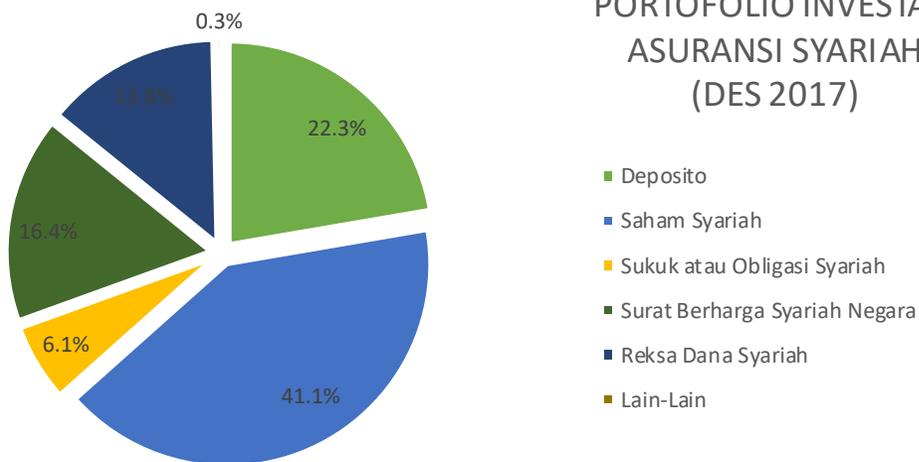


Volatilitas harga saham yang tidak stabil dapat mempengaruhi hasil investasi yang diharapkan

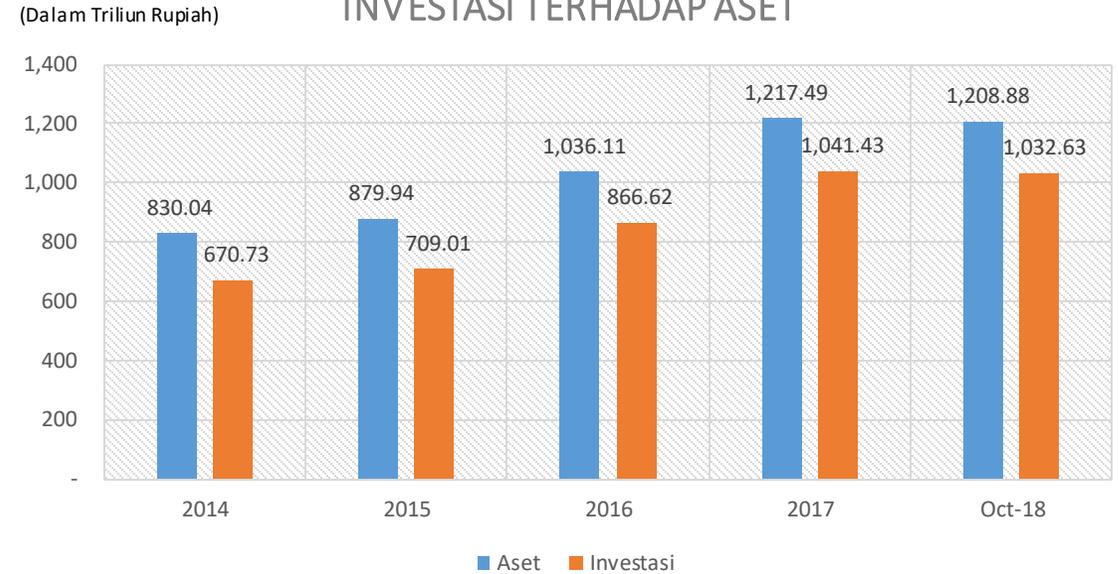
PORTOFOLIO INVESTASI ASURANSI KONVESIONAL (DES 2017)



PORTOFOLIO INVESTASI ASURANSI SYARIAH (DES 2017)



INVESTASI TERHADAP ASET



Pada tahun 2017, industri asuransi konvensional menempatkan sebagian besar investasinya pada surat berharga Negara dan saham, sedangkan industri asuransi syariah lebih dominan penempatan investasi pada saham syariah dan deposito

Dampak Pertumbuhan Industri Asuransi

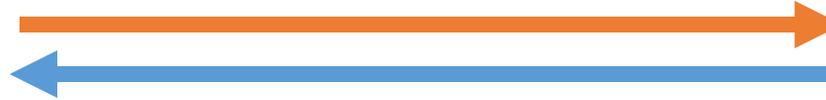


Pertumbuhan industri asuransi akan berdampak positif bagi perekonomian dan sebaliknya

Sumber: Kajian Peneliti PKSK, 2016

INDUSTRI ASURANSI

Perkembangan bisnis asuransi memiliki peranan penting dan berpengaruh positif bagi perekonomian Indonesia.



PERTUMBUHAN EKONOMI

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap perkembangan bisnis asuransi.

Sumber: Kajian LPEMUI dan AAJI, 2016

Terdapat keterkaitan yang erat antara kondisi makro perekonomian dengan industri perasuransian di Indonesia:



Kenaikan 1% dari GDP berdampak pada kenaikan Pendapatan Premi Perusahaan Asuransi sebesar Rp160,7 Milyar, sedangkan Kenaikan 1% dari Inflasi (diasosiasikan dengan peningkatan risiko) berdampak pada kenaikan Pendapatan Premi Perusahaan Asuransi sebesar Rp8,6 Milyar

Dana Pensiun

Pertumbuhan dana pensiun sukarela stagnan sedangkan Program Pensiun Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Tumbuh cukup tinggi



Dana Pensiun Bersifat Wajib

- PT Taspen (untuk ASN)
- PT Asabri (untuk anggota TNI dan Polri)
- BPJS Ketenagakerjaan (untuk pekerja formal selain ASN, TNI, dan Polri)

Dana Pensiun Bersifat Sukarela

- Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

- Pertumbuhan dana pensiun sukarela stagnan. Cakupan kepesertaan hanya sekitar 5% s.d. 6% dari total tenaga kerja.
 - ❑ Pertumbuhan aset investasi pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 2,1% dan 2,5% (Pertumbuhan pada 2016 masih tinggi yakni sebesar 14,9%). Per Desember 2018 total aset investasi sebesar Rp260,94 triliun.
 - ❑ Jumlah institusi mengalami kecenderungan menurun. Dari tahun 2015 ke 2018 jumlah institusi sebanyak: 267, 249, 236, 232.
- Stagnansi akibat adanya:
 - Beberapa program wajib yang memberikan tambahan beban baik kepada Pemberi Kerja maupun Pekerja
 - Keterbatasan (*affordability*) pekerja dalam melakukan saving
 - Literasi yang masih rendah mengenai perlunya dana pensiun untuk hari tua

Program dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)) mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 24,5% dan 21,7%. Per Desember 2017, aset investasi sebesar Rp279,9 triliun



3

Kinerja APBN 2018 (Realisasi Sementara)



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**





Realisasi APBN 2018 - Sangat Baik dan Optimal

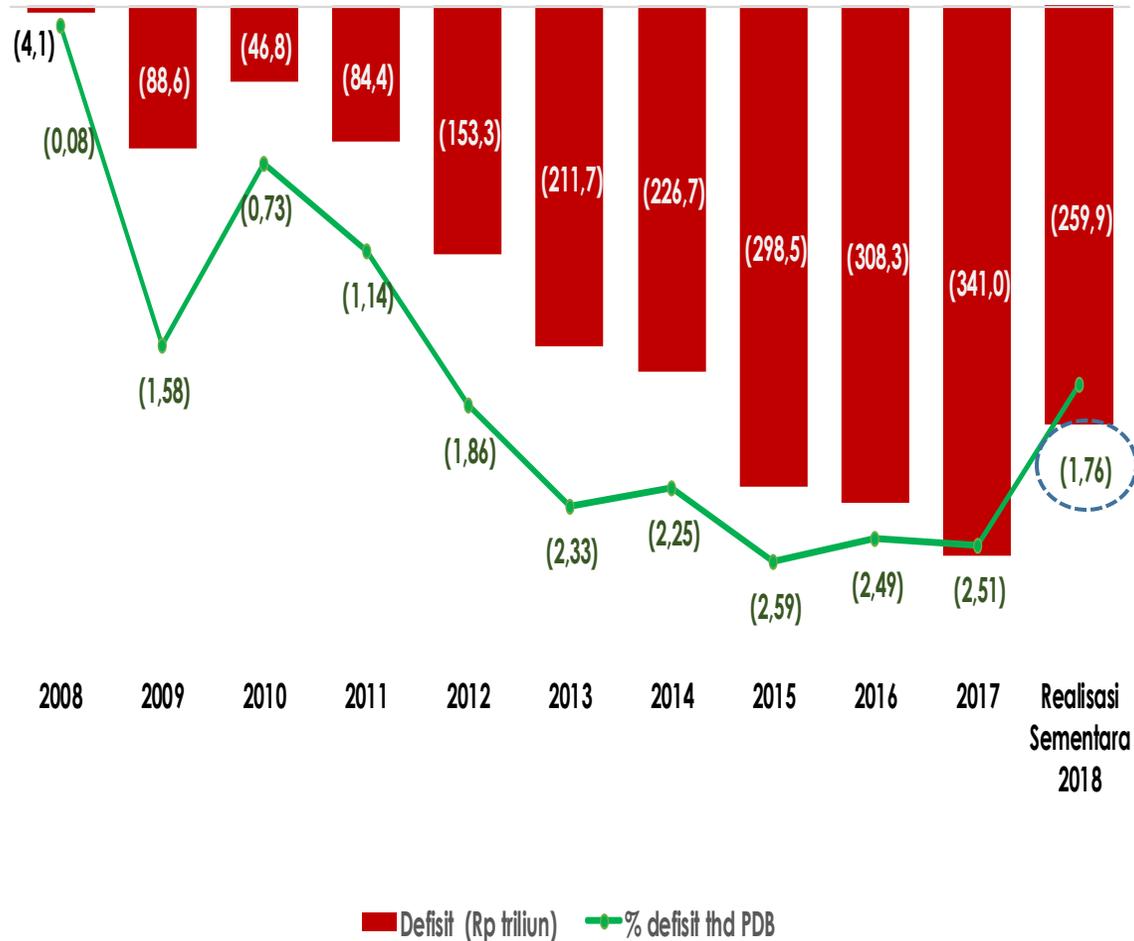
Pendapatan Negara 102,5%, Belanja Negara 99,2%

APBN (triliun Rupiah)	2017				2018			
	APBNP	LKPP	% thd APBNP	growth (%)	APBN	Realisasi Sementara	% thd APBN	growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.666,4	96,0	7,1	1.894,7	1.942,3	102,5	16,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.654,7	95,5	7,0	1.893,5	1.928,4	101,8	16,5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.343,5	91,2	4,6	1.618,1	1.521,4	94,0	13,2
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	311,2	119,6	18,8	275,4	407,1	147,8	30,8
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	11,6	374,2	29,4	1,2	13,9	1.161,4	19,5
B. BELANJA NEGARA	2.133,3	2.007,4	94,1	7,7	2.220,7	2.202,2	99,2	9,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.367,0	1.265,4	92,6	9,6	1.454,5	1.444,4	99,3	14,2
1. Belanja K/L	798,6	765,1	95,8	11,8	847,4	836,2	98,7	9,3
2. Belanja Non K/L	568,4	500,2	88,0	6,5	607,1	608,2	100,2	21,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,3	742,0	96,8	4,5	766,2	757,8	98,9	2,1
1. Transfer ke Daerah	706,3	682,2	96,6	2,8	706,2	697,9	98,8	2,3
2. Dana Desa	60,0	59,8	99,6	28,0	60,0	59,9	99,8	0,2
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(178,0)	(124,4)	69,9	(0,9)	(87,3)	(1,8)	2,1	(98,6)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(397,2)	(341,0)	85,8	10,6	(325,9)	(259,9)	79,7	(23,8)
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,92)</i>	<i>(2,51)</i>			<i>(2,19)</i>	<i>(1,76)</i>		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	397,2	366,6	92,3	9,6	325,9	300,4	92,2	(18,1)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN		25,6				40,5		

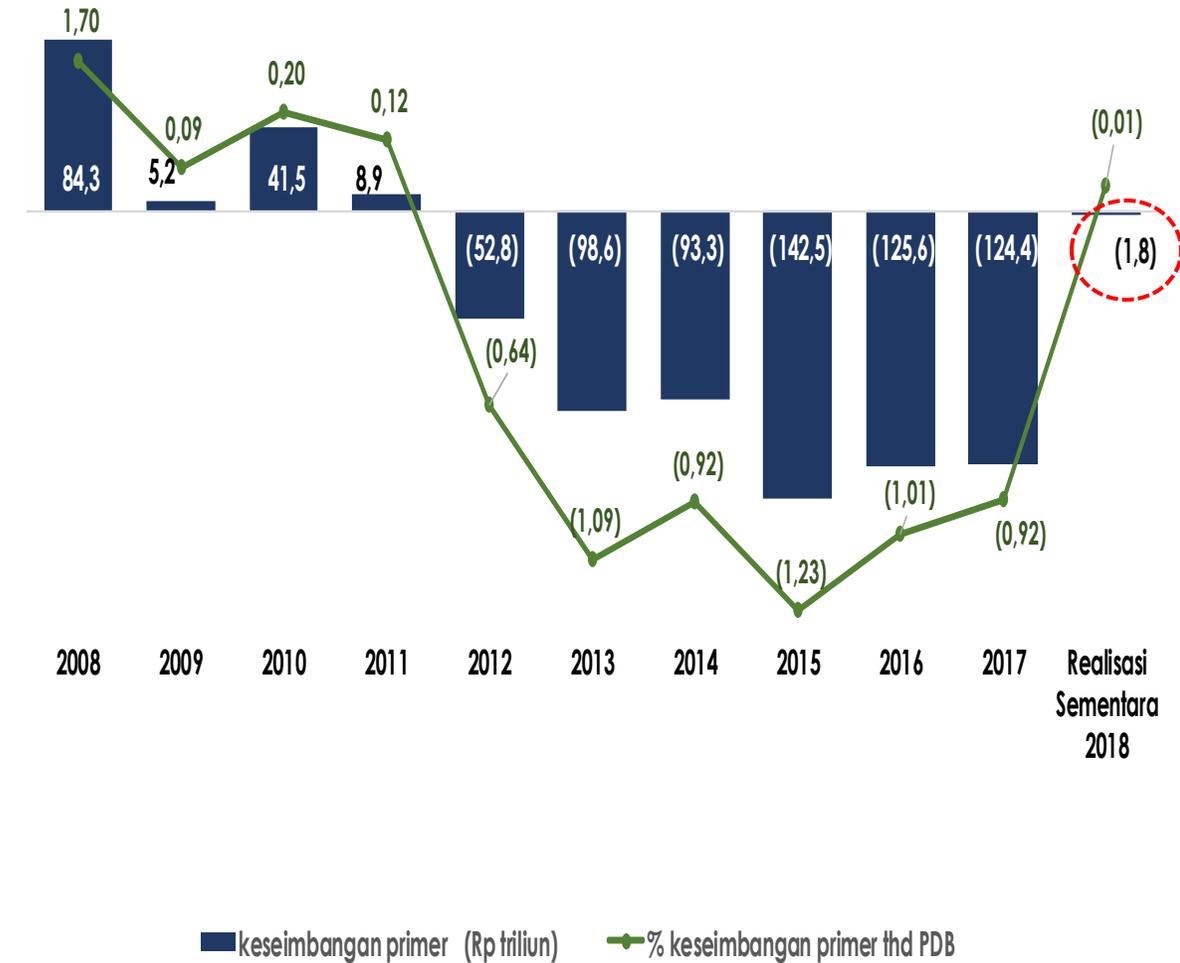
Defisit Anggaran dan Defisit Keseimbangan Primer menurun tajam - TERKECIL sejak 2012



Defisit Anggaran



Keseimbangan Primer





4

Kebijakan Fiskal dan APBN 2019



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Indikator Ekonomi Makro



		Outlook 2018	RAPBN 2019	APBN 2019
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,3	5,3
	Inflasi (% yoy)	3,5	3,5	3,5
	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.294	14.400	15.000
	Suku Bunga SPN (%)	5,0	5,3	5,3
	Harga Minyak (US\$/barrel)	70	70	70
	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	775	750	775
	Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.131	1.250	1.250
	Cost Recovery (miliar USD)	11,3	11,3	10,22

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 diproyeksikan akan membaik



Komponen PDB	2019
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,1
Konsumsi Pemerintah	5,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,0
Ekspor	6,3
Impor	7,1
Pertumbuhan PDB	5,3

- Penyelesaian **pembangunan infrastruktur** menjadi pendorong investasi.
- **Tingkat konsumsi** diperkirakan tumbuh baik, terutama dari penciptaan lapangan kerja dan tingkat inflasi yang terjaga.
- Tahun 2019 terdapat **tantangan**, termasuk volatilitas keuangan global akibat kebijakan moneter AS dan ketidakpastian perdagangan global akibat perang dagang,
- Kebijakan fiskal diarahkan memperkuat investasi di tengah upaya menjaga **stabilitas perekonomian** (*stability over growth*)

PERTUMBUHAN MENURUT PRODUKSI

- **Sektor Industri Pengolahan** didorong sebagai penggerak pertumbuhan. Fokus pada industri unggulan, a.l. : pangan, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik sejalan dengan roadmap *Making Indonesia 4.0*
- **Sektor Perdagangan** diperkirakan meningkat seiring daya beli masyarakat yang terjaga dan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa domestik serta ekspor-impor
- **Sektor Konstruksi** konsisten tumbuh tinggi seiring investasi bangunan dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- **Sektor Transportasi dan pergudangan** tumbuh tinggi didukung pembangunan infrastruktur transportasi baru seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, serta beroperasinya moda transportasi baru (MRT dan LRT)
- **Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum** tumbuh tinggi sejalan dengan pencaangan destinasi wisata baru, dan pemasaran '*Wonderful Indonesia*'

Pertumbuhan	2019
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	3,8
Pertambangan dan Penggalian	0,6
Industri Pengolahan	5,1
Pengadaan Listrik dan Gas	6,1
Pengadaan Air, ... dan Daur Ulang	5,0
Konstruksi	6,6
Perdagangan Besar dan Eceran	5,3
Transportasi dan Pergudangan	8,8
Akomodasi Makan Minum	6,1
Informasi dan Komunikasi	10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,9
Real Estate	4,3
Jasa Perusahaan	8,2
Administrasi Pemerintahan ...	4,0
Jasa Pendidikan	5,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2
Jasa lainnya	8,8
PDB	5,3



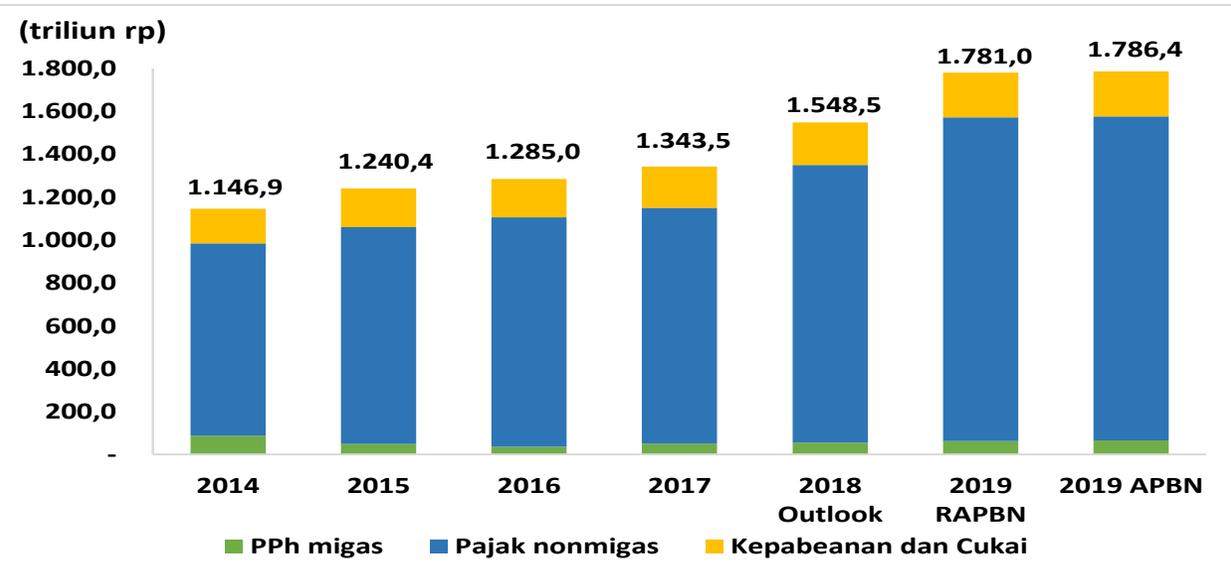
Perubahan nilai tukar dan lifting berdampak pada meningkatnya pendapatan dan belanja negara, namun defisit tetap dijaga 1,84% terhadap PDB

Uraian (triliun Rupiah)	2018	2019		
	Outlook APBN	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.903,0	2.142,5	2.165,1	22,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.897,6	2.142,1	2.164,7	22,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.548,5	1.781,0	1.786,4	5,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<i>11,57</i>	<i>12,11</i>	<i>12,22</i>	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	349,2	361,1	378,3	17,2
II. PENERIMAAN HIBAH	5,4	0,4	0,4	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.217,3	2.439,7	2.461,1	21,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.453,6	1.607,3	1.634,3	27,0
1. Belanja K/L	813,5	840,3	855,4	15,2
2. Belanja Non K/L	640,2	767,1	778,9	11,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,6	832,3	826,8	(5,6)
1. Transfer ke Daerah	703,6	759,3	756,8	(2,6)
2. Dana Desa	60,0	73,0	70,0	(3,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(64,8)	(21,7)	(20,1)	1,6
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(314,2)	(297,2)	(296,0)	1,2
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,12)</i>	<i>(1,84)</i>	<i>(1,84)</i>	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	314,2	297,2	296,0	(1,2)
I. PEMBIAYAAN UTANG	387,4	359,3	359,3	(0,0)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65,7)	(74,8)	(75,9)	(1,1)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6,5)	(2,3)	(2,4)	(0,1)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,1)	0,0	0,0	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,2	15,0	15,0	0,0

Penerimaan Perpajakan tetap realistis, diperkirakan tumbuh 15,4 % dari outlook APBN 2018 → didukung reformasi perpajakan



Lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir (2018-2017 tumbuh 11,1%)



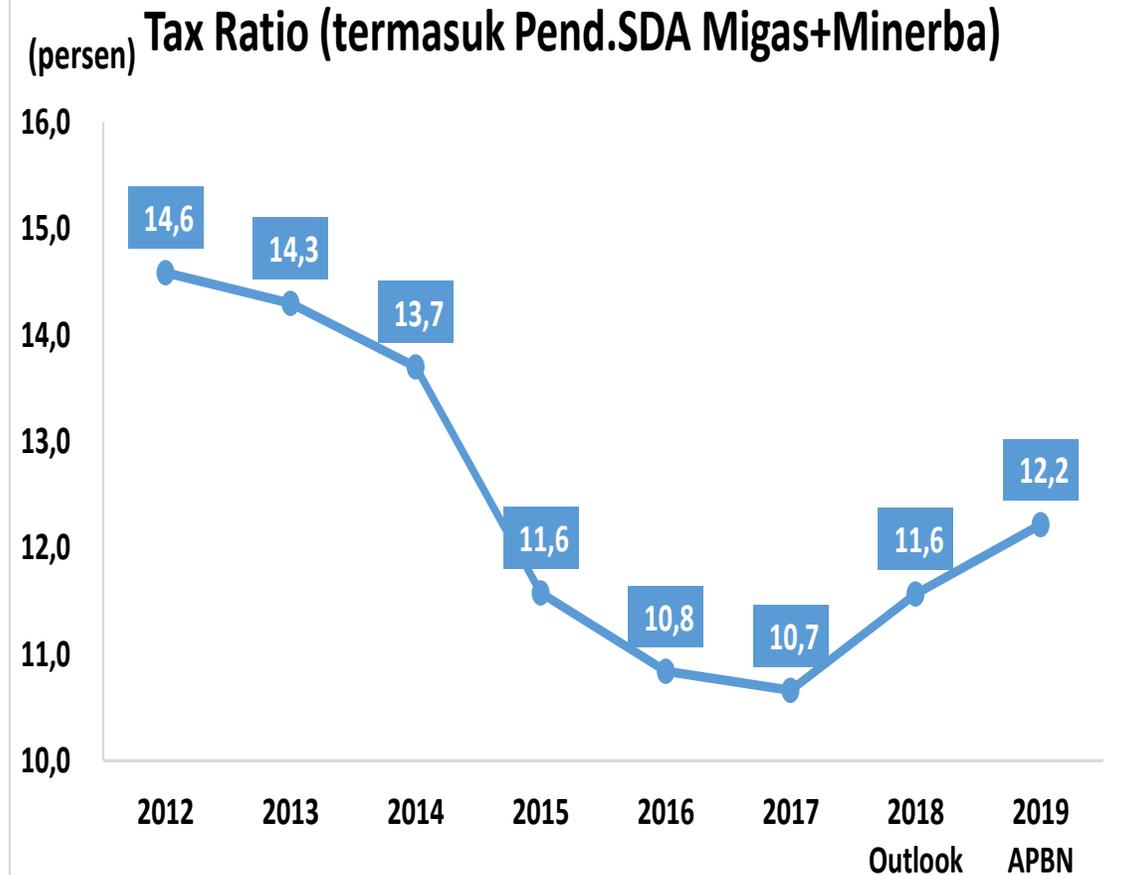
Kontribusi Penerimaan Perpajakan semakin meningkat → menuju kemandirian

dari 74% di tahun 2014 menjadi 82,5% di tahun 2019

Pajak tetap Menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing

Insentif fiskal (Tax Allowance, Tax Holiday)

Tax ratio terus meningkat → 12,2% di tahun 2019

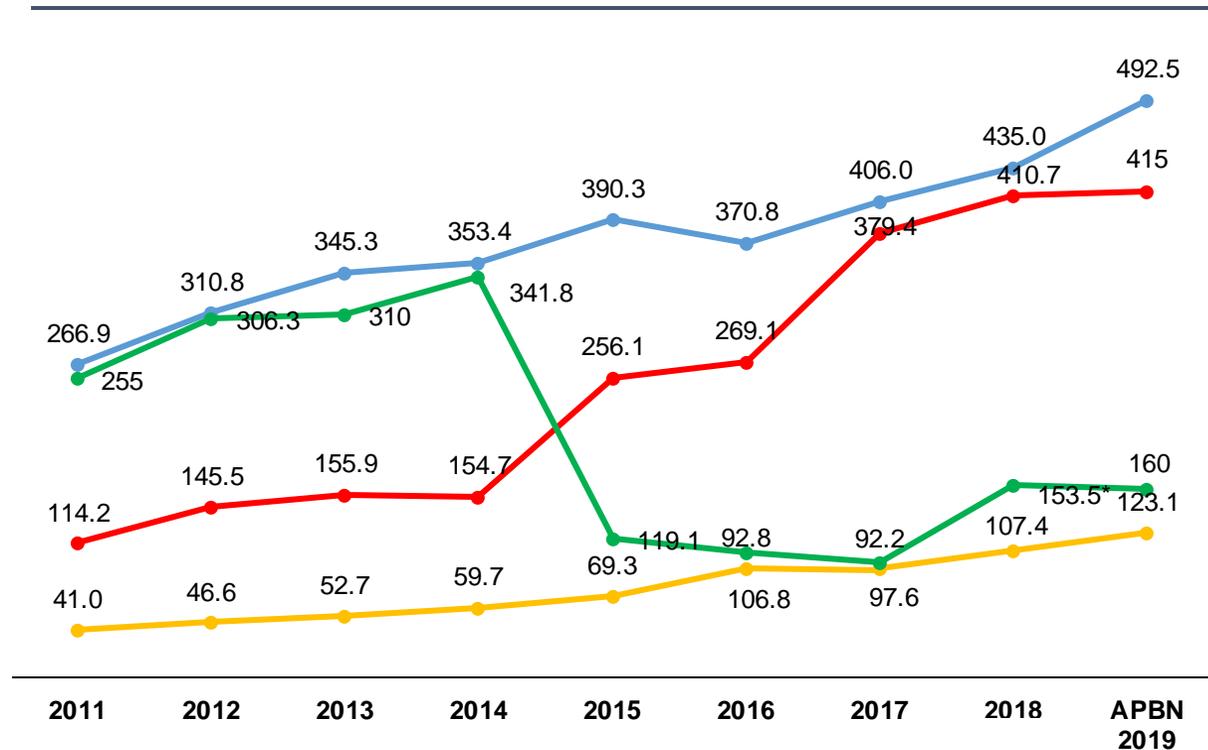




Terus memperkuat kualitas belanja

Realokasi ke pengeluaran yang lebih produktif: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Anggaran Belanja (IDR Tn)



Δ 2018 : 2014

23,1%

165,5%

52,2%

79,9%

APBN 2019

Rp 492,5 Tn

Rp 415,0 Tn

Rp 160 Tn

Rp 123,1 Tn

Pendidikan

Infrastruktur

Subsidi Energi

Kesehatan

Menjaga komitmen untuk memenuhi alokasi APBN 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan dalam rangka mendukung kualitas sumber daya manusia, dan memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur



5

Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Investasi dan Ekspor



Insentif Fiskal untuk Mendorong Investasi

- ✓ Tax Holiday
- ✓ Tax Allowance
- ✓ Pembebasan PPh Impor
- ✓ Insentif PPh untuk penanaman hasil ekspor di dalam negeri

Fasilitas PPh

Pembebasan PPN:

- ✓ Jasa Keuangan
- ✓ Transaksi di Kawasan Perdagangan Bebas
- ✓ R&D
- ✓ Bahan untuk memproduksi barang ekspor

Fasilitas PPN

- ✓ Pembebasan Bea Masuk atas barang modal
- ✓ KITE
- ✓ Kawasan Penimbunan Berikat
- ✓ BMDTP

Fasilitas Kepabeanan

- ✓ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- ✓ Kawasan Industri
- ✓ Kawasan Perdagangan Bebas

Fasilitas Zonasi



Belanja Perpajakan

Pentargetan insentif pajak yang tepat dalam rangka memberikan *multiplier effect* untuk kegiatan ekonomi

- Belanja pajak adalah penerimaan pajak yang hilang atau tidak jadi diterima sebagai konsekuensi dari penerapan perlakuan khusus atau deviasi dari perlakuan umum yang disebut "*benchmark tax system*" terhadap subjek dan objek pajak tertentu dengan kriteria tertentu.

Summary of Estimated Tax Expenditure by Tax Type Trillion Rp

Tax Type	2016	2017
VAT and Luxury Tax	114,227	125,329
Income Tax	20,525	20,179
Custom and Excise	8,839	9,153
Total	143,591	154,660

Summary of Estimated Tax Expenditure by Purpose Trillion Rp

Purpose	2016	2017
Protect MSME	35,730	41,606
Encourage Investment	21,113	21,170
Suport Business	30,286	32,403
Improve General Welfare	56,462	59,481
Total	143,591	154,660

Summary of Estimated Tax Expenditure by Subject Trillion Rp

Subject	2016	2017
Business Entity	37,872	40,189
Business Entity and Household	13,528	12,385
MSME	35,730	41,606
Household	56,461	59,480
Total	143,591	154,660

Summary of Estimated Tax Expenditure by Sector Trillion Rp

Sector	2016	2017
Manufacture Industry	12,242	12,383
Finance Service	16,216	17,631
Health and Education Service	10,889	11,890
Social Service	917	1,125
Transportation Service	12,045	12,854
Gas, Water, and Electricity	11,994	12,392
Mining and Excavation	2,013	1,840
Fishery and Agriculture	13,566	14,246
Multisector	63,709	70,300
Total	143,591	154,660



Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017

Tax Expenditure Report 2016-2017



Estimasi Belanja Perpajakan:

Pada 2016, diperkirakan Rp143,4 T atau **1,15% PDB**

Pada 2017 diperkirakan Rp154,4 T atau **1,14% PDB**



- 

Merupakan fasilitas **pengurangan Pajak Penghasilan badan** atas penghasilan dari Kegiatan Usaha Utama, sebesar **persentase** tertentu, dalam **jangka waktu** tertentu*
- 

Diberikan kepada **penanaman modal baru**
- 

Nilai penanaman modal baru minimal **Rp 100 miliar**
- 

Diberikan kepada **18 industri pionir**
 * industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional

*untuk investasi antara Rp100 miliar hingga Rp 500 miliar akan memperoleh pengurangan pajak 50% dalam waktu 5 tahun

Perbandingan dengan peraturan sebelumnya

PMK 105/2015 jo. PMK 130/2011
2011 – Maret 2018

PMK 150/2018 jo. PMK 35/2018
April 2018

5 Perusahaan



12 Perusahaan

Jumlah Tax Holiday yang Diberikan

Rp39.4 Triliun



Rp210.8 Triliun

Total Rencana Investasi

**SUMATERA 3
JAWA 2**



Lokasi

**SUMATERA 2
JAWA 3
SULAWESI 5
MALUKU 2**

**Swiss, Belanda,
Indonesia**



Asal Investor

**China, Hongkong,
Singapore Japan,
Netherlands,
Indonesia**



**Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

TERIMA KASIH

Website

www.kemenkeu.go.id
www.fiskal.kemenkeu.go.id/iru

Email

iru@fiskal.kemenkeu.go.id



INSENTIF PERPAJAKAN UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN EKSPOR (1)

Insentif Pajak untuk Sektor-sektor secara Umum dan Spesifik

Tax Holiday

Pengurangan PPh untuk industry pioneer sebesar 100% dengan masa 5 s.d. 20 tahun sesuai dengan nilai investasi. Waktu transisi 2 tahun dengan pengurangan PPh 50%.

Tax Allowance

Allowance diberikan 30% dari nilai investasi (5% per tahun selama 6 tahun), juga termasuk percepatan depresiasi dan amortisasi, tarif pajak dividen untuk WP asing sampai dengan 10% sesuai Tax Treaty, serta kompensasi kerugian yang diperpanjang lebih dari 5 tahun (maksimal 10 tahun).

Pembebasan Bea Masuk

Diberikan terhadap mesin dan barang modal selama 2 tahun dan bisa diperpanjang (PMK 176/2009 jo. PMK 188/2015)

BMDTP

Untuk industry spesifik selama 1 tahun sesuai dengan rekomendasi Menteri Perindustrian.

Import Duty

Diberikan kepada industri pembangkit listrik untuk kebutuhan publik.

VAT Exemption

Untuk barang-barang strategis termasuk mesin dan peralatan industry.

Insentif Pajak untuk sector Hulu Migas

Gross Split & Cost Recovery

Insentif PPh untuk Bank Lokal yang Diakuisisi

Insetif PPh dan PPN untuk Konstruksi REIT/KIK DIRE

Insentif PPh untuk Devisa Hasil Ekspor

PPh untuk bunga deposito dari hasil ekspor sebesar 0%-10%. (tarif normal 20%)

INSENTIF PERPAJAKAN UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN EKSPOR (2)

Insentif Pajak untuk Zonasi

Untuk mengurangi disparitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Kawasan Ekonomi Khusus

Fasilitas : Pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Cukai, dan insentif penggunaan konten lokal, serta pengenaan PPh khusus.

Kawasan Industri

Fasilitas: Tax holiday, tax allowance, Pembebasan Bea Masuk dan PPN Impor

Free Trade Zone

Fasilitas: Pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai

Kawasan Penimbunan Berikat

Fasilitas: Pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai

Insentif Pajak Khusus untuk Mendorong Ekspor

KITE

Fasilitas: Pembebasan Bea Masuk, PPN Impor untuk bahan baku yang akan diproduksi untuk ekspor

Penugasan Khusus Ekspor

Pembiayaan ekspor untuk sektor-sektor tertentu melalui Badan Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dianggap penting tetapi tidak layak secara komersial

Tugas ini telah diberikan kepada PT INKA (ekspor kereta ke Bangladesh), PT DI (ekspor pesawat ke Afrika) dan industri kecil menengah

Kawasan Penimbunan Berikat

Fasilitas: Pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai

Revisi Peraturan Tax Holiday

Simplifikasi prosedur administrasi dan peningkatan efektivitas



	Peraturan Lama (PMK 105/2015)	Peraturan Terbaru (PMK 150/2018)
Subjek	WP Baru	Investasi baru
Persentase Pengurangan Pajak	10-100%	100% (single rate)
Jangka Waktu	5-15 years Dapat diperpanjang hingga 20 tahun sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan	Sesuai dengan besaran investasi: <ul style="list-style-type: none"> • Rp500 Miliar s.d. < Rp1 Triliun: 5 tahun • Rp1 Triliun s.d. < Rp5 Triliun: 7 tahun • Rp5 Triliun s.d. < Rp15 Triliun: 10 tahun • Rp15 Triliun s.d. < Rp30 Triliun: 15 tahun • Minimum Rp30 Triliun: 20 tahun
Transisi	Tidak Diatur	50% untuk 2 Tahun
Cakupan Industri	8 Industri Pioneer	18 Industri Pioneer

Daftar 18 Industri Pioneer

No	Industri Pioneer	No	Industri Pioneer
1	Logam Dasar	10	Mesin Industri
2	Pemurnian dan Pengilangan Migas	11	Komponen Utama Mesin
3	Petrokimia	12	Komponen Robotik
4	Kimia Dasar Anorganik	13	Komponen Utama Kapal
5	Kimia Dasar Organik	14	Komponen Utama Pesawat Terbang
6	Bahan Baku Farmasi	15	Komponen Utama Kereta Api
7	Semi Konduktor	16	Pembangkit Tenaga Listrik
8	Alat Komunikasi	17	Infrastruktur Ekonomi
9	Alat Kesehatan	18	Ekonomi Digital



Tax Allowance

Bagi Industri Tertentu di Daerah Tertentu

- UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
- PP 18 Tahun 2015 s.t.d.d. PP 9 Tahun 2016
- PMK 89/PMK.010/2015

Tujuan

mendorong investasi pada industri tertentu di daerah-daerah tertentu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu

Kriteria dan Persyaratan Industri

- memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
- memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
- memiliki kandungan lokal yang tinggi

serta bidang usaha terdapat dalam Lampiran I dan II PP 18/2015 s.t.d.d. PP 9/2016

Bentuk Fasilitas

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% pertahun;
- Penyusutan dan amortisasi dipercepat;
- Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen kepada Wajib Pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- Kompensasi kerugian 5 s.d. 10 tahun

Insentif fiskal pada kawasan ekonomi khusus (KEK)



LOKASI

KEK Sei Mangkei

KEK Tanjung Lesung

KEK Palu

KEK Bitung

KEK Morotai

KEK Tanjung Api-api

KEK Mandalika

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

KEK Tanjung Kelayang

KEK Sorong

KEK Arun Lhokseumawe

Dasar Hukum : PMK

1047/PMK.0107/2016

PPh

1. KEGIATAN UTAMA

Investasi > 1 T:

- pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 10-25 tahun

Investasi 500M – 1T:

- pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun

Investasi < 500M:

- pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun

2. KEGIATAN LAINNYA

- Pengurangan penghasilan netto sebesar 30%, diberikan selama 6 tahun
- Penyusutan yang dipercepat
- PPh atas deviden sebesar 10%
- Kompensasi kerugian 5-10 tahun

PPN

Atas pemasukan barang kena pajak tertentu (termasuk barang modal) ke KEK:

- Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM
- Tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor

Bea Masuk dan Cukai

Atas impor barang modal ke KEK dalam rangka pembangunan atau pengembangan:

- Diberikan pembebasan Bea Masuk
- Cukai dibebaskan

Atas impor barang berupa bahan baku produksi ke KEK:

- Diberikan penanguhan Bea Masuk
- Diberikan tarif Bea Masuk sebesar 0% (nol persen) apabila barang jadi yang menggunakan bahan baku barang impor terkait diproduksi menggunakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal sebesar 40% (empat puluh persen)
- Diberikan pembebasan Cukai

Ekspor:

- Sesuai Ketentuan Berlaku